

ABSTRAK

SITI AMINAH (NIM. 2210622073), *UTUSAN GOLONGAN DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (Studi Atas Komposisi Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Dibimbing oleh Ahmad Ahsin Thohari sebagai Pembimbing Utama dan Kaharuddin sebagai Pembimbing Pendamping.

Reformasi tahun 1998 berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya yaitu mengubah komposisi keanggotaan MPR yang semula terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan-utusan dari golongan-golongan dan daerah-daerah berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mendasarkan penelitiannya kepada norma-norma hukum positif, peraturan perundangan yang didukung dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan utusan golongan dalam sistem perwakilan Indonesia masih sangat urgen, namun dalam sistem perwakilan Indonesia saat ini belum bisa mengakomodirnya. Untuk itu dalam penelitian ini merekomendasikan agar utusan golongan dapat kembali hadir dalam sistem perwakilan Indonesia tentunya melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun selama belum terlaksana amandemen maka dapat di bentuk Komisi Kajian Bhinneka Tunggal Ika sebagai wadah sementara bagi utusan golongan.

Kata Kunci: Urgen, Utusan Golongan, Komisi Kajian Bhinneka Tunggal Ika

ABSTRACT

SITI AMINAH (NIM. 2210622073), GROUP MESSENGER IN THE INDONESIAN REPRESENTATIVE SYSTEM (*Study of the Composition of the Membership of the People's Consultative Assembly After the Fourth Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*). Supervised by Ahmad Ahsin Thohari as Main Supervisor and Kaharuddin as Assistant Supervisor.

The 1998 reforms succeeded in amending the Constitution of the Republic of Indonesia, one of which was changing the composition of the MPR membership which originally consisted of members of the People's Representative Council and delegates from groups and regions to become the People's Consultative Assembly consisting of members of the Representative Council. The people and the Regional Representative Council are elected through general elections.

This research uses normative juridical methods, namely research that bases its research on positive legal norms, statutory regulations which are supported by literature studies that are relevant to the problems discussed.

The results of this research are that the existence of group delegates in the Indonesian representative system is still very urgent, but the current Indonesian representative system cannot accommodate them. For this reason, this research recommends that group delegates can return to the Indonesian representative system through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but as long as the amendments have not been implemented, a Bhinneka Tunggal Ika Study Commission can be formed as a temporary forum for group delegates.

Keywords: *Urgent, Group Representatives, Bhinneka Tunggal Ika Study Commission*